

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja

2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Dewi dan Gunawan, 2018: 712).

Secara garis besar penduduk dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang tergolong tenaga kerja adalah jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja (Maryanti, Wiyati, dan Thamrin 2017: 33-34).

Dari pengertian di atas, artinya tenaga kerja adalah sesuatu yang identik dengan seseorang yang mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau untuk masyarakat.

2.1.1.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Menurut Maryanti, Wiyati, dan Thamrin (2017: 39-41), tenaga kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penduduk

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut UU Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja adalah mereka yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun

b. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan kerja. Menurut UU Tenaga Kerja, mereka adalah penduduk di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun

2. Berdasarkan Batas Kerja

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun sedang aktif mencari pekerjaan

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya

3. Berdasarkan Kualitas

a. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara bersekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya seperti pengacara, dokter, guru, dan sebagainya

b. Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya seperti apoteker, ahli bedah, mekanik, dan sebagainya

c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya seperti kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Dari klasifikasi tenaga kerja di atas, ternyata tenaga kerja dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok seperti tenaga kerja dan bukan tenaga kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, hingga tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya tenaga kerja tidak serta-merta merupakan seseorang yang sedang melakukan pekerjaan.

2.1.1.3 Teori-teori Ekonomi Sumber Daya Manusia

Mulyadi (2019: 4-9) mengungkapkan beberapa teori tentang ekonomi sumber daya manusia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Klasik Adam Smith

Smith menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi

2. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah *Principles of Population*. Dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Di satu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja

dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia.

Pesimis Malthus disebabkan kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Meskipun pemakaian tanah untuk produksi tidak akan seberapa. Dalam banyak hal justru jumlah tanah untuk pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik, dan bangunan lain, serta pembuatan jalan.

Menurut Malthus manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur (*geometric progression*, dari 2 ke 4, 8, 16, 32, dan seterusnya), sedangkan pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung (*arithmetic progression*, dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya). Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian, maka Malthus meramal bahwa suatu ketika akan terjadi malapetaka (*disaster*) yang akan menimpa umat manusia.

Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berlomba dengan penduduk. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi per kepala. Dalam *Essays on the Principles of Population* (1796), ia menguraikan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari dari malapetaka adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang Malthus

tawarkan adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak (KB). Pembatasan seperti ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral. Jika hal ini tidak dilakukan, demikian ia menguraikan, persoalan ini akan diselesaikan secara alamiah, antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan, dan sebagainya

3. Teori Keynes

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh (*full employed*). Dengan demikian, di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Jika tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Ketersediaan untuk bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak.

Kritik Jhon Maynard Keynes (1883-1946) terhadap sistem klasik salah satunya adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (*adjustment*) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh. Dalam kenyataan, pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik di atas. Dimana pun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan tingkat upah.

Kalau pun tingkat upah diturunkan, maka boleh jadi tingkat pendapatan masyarakat akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga. Jika harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja (*marginal value of productivity of labor*) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja akan turun. Jika penurunan harga-harga tidak begitu besar, maka kurva nilai produktivitasnya hanya turun sedikit. Meskipun demikian, jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi jika harga-harga turun drastis, maka kurva nilai produktivitas marjinal dari tenaga kerja juga akan turun drastis yang mana jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin bertambah banyak.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh ketiga tokoh ekonomi terkemuka di atas, terdapat perbedaan pendapat di antara ketiganya. Menurut Adam Smith, manusialah faktor produksi utama yang dapat menentukan kemakmuran bangsa, karena sumber daya alam tidak mungkin bermanfaat jika tidak ada yang dapat mengolahnya dengan baik. Kemudian menurut Malthus, tidak ada keselarasan antara pertumbuhan jumlah faktor produksi (tanah) dengan manusia sehingga dikhawatirkan kelak akan timbul suatu bencana seperti perang, epidemi, kekurangan pangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Keynes, tidak mungkin terjadi kondisi dimana tidak ada pengangguran (tetap bersedia bekerja walaupun

dibayar murah), karena para pekerja memiliki serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan upah.

2.1.1.4 Teori-teori tentang Ketenagakerjaan

Menurut Mulyadi (2019: 70-71), ada dua teori penting yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan, yaitu:

1. Teori Lewis (1959)

Mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Menurut Lewis, sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran.

Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap. Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan

meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten terbelakang ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”

2. Teori Fei-Ranis (1961)

Berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri seperti kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyaknya pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis, ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh, yaitu:

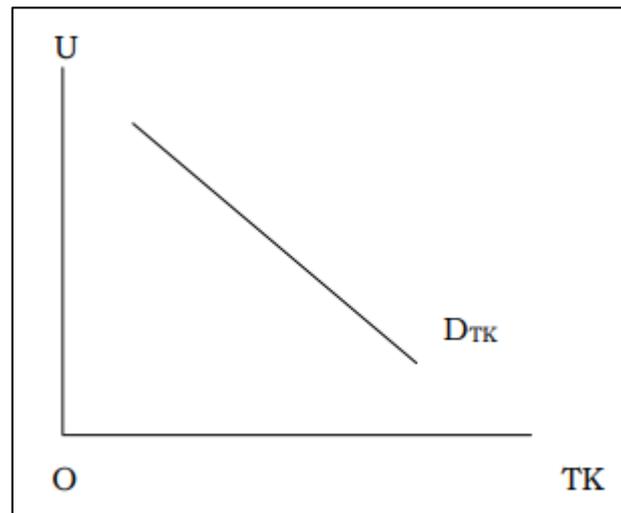
- a. Tahap dimana para penganggur semu (yang tidak menambah *output* pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama
- b. Tahap dimana pekerja pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri

- c. Tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan penambahan *output* dan perluasan usahanya.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh kedua tokoh di atas mengenai ketenagakerjaan, menurut Lewis kelebihan pekerja di satu sektor tidak serta-merta terlihat sebagai sesuatu yang tidak baik, karena justru kelebihan tersebut akan memberikan andil terhadap penambahan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Sedangkan menurut Fei-Ranis, pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pengalihan para penganggur semu ke sektor industri dengan tingkat upah yang sama, tahap pengalihan pekerja pertanian yang menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari tingkat upah yang diperoleh, dan tahap ditandainya awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* yang lebih besar daripada perolehan tingkat upahnya.

2.1.1.5 Konsep Permintaan Tenaga Kerja

Lilimantik (2016: 18) mengungkapkan dalam hal tenaga kerja, kurva permintaan menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang pengusaha bersedia untuk mempekerjakannya pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.



Sumber: Lilimantik, E. (2016). *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Banjarmasin: Fakultas Perikanan dan Kelautan UNLAM (FPK UNLAM)

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Gambar 2.1 menjelaskan kurva permintaan tenaga kerja yang dapat dilihat sebagai gambaran bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja (TK) dengan tingkat upah yang maksimum (U) dimana pihak pengusaha bersedia untuk mempekerjakan. Dengan salah satu pandangan, permintaan tenaga kerja haruslah dilihat sebagai suatu kerangka alternatif yang dapat diperoleh pada suatu titik tertentu yang ditetapkan pada suatu waktu.

Analisis permintaan tenaga kerja didasarkan atas asumsi bahwa permintaan pasar tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya. Tenaga kerja diminta karena kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian, analisis permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori produktivitas tenaga kerja.

Menurut Simanjuntak (1998: 89-91), dasar yang perlu digunakan pengusaha untuk menambah atau mengurangi tenaga kerjanya adalah sebagai berikut.

Pertama, pengusaha perlu memperkirakan tambahan hasil (*output*) yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan seorang tenaga kerja. Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marjinal atau *marginal physical product* dari karyawan, disingkat MPP_L .

Kedua, pengusaha menghitung jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marjinal atau *marginal revenue*, yaitu nilai dari MPP_L tadi. Jadi *marginal revenue* sama dengan nilai dari MPP_L , yaitu besarnya MPP_L dikalikan dengan harganya per unit (P). Jadi:

$$MR = VMPP_L = MPP_L \times P$$

dimana:

MR = *marginal revenue* (penerimaan marjinal)

$VMPP_L$ = *value marginal physical product of labor* (nilai pertambahan hasil marjinal dari tenaga kerja)

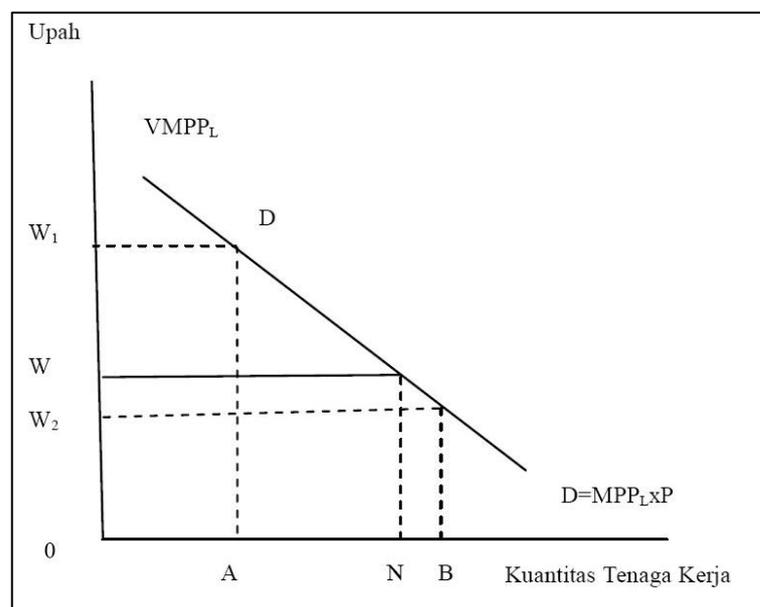
MPP_L = *marginal physical product of labor*

P = harga jual barang yang diproduksi per unit.

Akhirnya sang pengusaha membandingkan MR tersebut dengan biaya mempekerjakan tambahan seorang tenaga kerja tadi. Jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha sehubungan dengan mempekerjakan tambahan seorang tenaga kerja adalah upahnya sendiri (W) dan dinamakan biaya marjinal atau

marginal cost (MC). Bila tambahan penerimaan marjinal (MR) lebih besar daripada biaya mempekerjakan orang yang menghasilkannya (W), maka mempekerjakan tambahan orang tersebut akan menambah keuntungan pengusaha. Dengan kata lain dalam rangka menambah keuntungan, pengusaha akan terus menambah jumlah tenaga kerja selama MR lebih besar daripada W.

Misalkan tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat-alat dan faktor produksi lain jumlahnya tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marjinal menjadi lebih kecil pula. Dengan kata lain, semakin bertambah karyawan yang dipekerjakan, semakin kecil MPP_L -nya dan nilai MPP_L itu sendiri. Ini yang dinamakan hukum *diminishing returns* dan dilukiskan dengan garis DD dalam Gambar 2.2.



Sumber: Simanjuntak, P. J. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Edisi Kedua). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Gambar 2.2 Fungsi Permintaan terhadap Tenaga Kerja

Garis DD melukiskan besarnya nilai hasil marjinal tenaga kerja (*value marginal physical product of labor*, $VMPP_L$) untuk setiap tingkat penempatan. Bila misalnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak $OA = 100$ orang, maka nilai hasil kerja orang yang ke-100 dinamakan $VMPP_L$ -nya dan besarnya sama dengan $MPP_L \times P = W_1$. Nilai ini lebih besar daripada tingkat upah yang sedang berlaku (W). Oleh sebab itu laba pengusaha akan bertambah dengan menambah tenaga kerja baru.

Pengusaha dapat terus menambah laba perusahaan dengan mempekerjakan orang hingga ON . Di titik N pengusaha akan mencapai laba maksimum dan nilai $MPP_L \times P$ sama dengan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Dengan kata lain pengusaha mencapai laba maksimum bila:

$$MPP_L \times P = W$$

Pertambahan tenaga kerja yang lebih besar daripada ON , misalkan OB akan mengurangi keuntungan pengusaha. Pengusaha membayar upah dalam tingkat yang berlaku (W), padahal nilai hasil marjinal yang diperolehnya hanya sebesar W_2 yang lebih kecil daripada W . Jadi pengusaha cenderung untuk menghindari jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada ON . Penambahan tenaga kerja yang lebih besar daripada ON dapat dilaksanakan hanya bila pengusaha yang bersangkutan membayar upah di bawah W dan/atau bila pengusaha mampu menaikkan harga jual barang.

2.1.1.6 Elastisitas Permintaan akan Tenaga Kerja

Simanjuntak (1998: 91-92) mengemukakan bahwa elastisitas permintaan akan tenaga kerja didefinisikan sebagai persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Secara umum dituliskan dalam persamaan:

$$e = \frac{\Delta N/N}{\Delta W/W} \dots\dots\dots (2.1)$$

dimana e adalah elastisitas permintaan akan tenaga kerja, ΔN adalah perubahan jumlah pekerja yang terjadi, N adalah jumlah yang bekerja mula-mula, ΔW adalah besarnya perubahan tingkat upah, dan W adalah tingkat upah yang sedang berlaku. Rumus (2.1) dapat ditulis dalam bentuk:

$$e = \frac{\Delta N}{\Delta W} \cdot \frac{W}{N} \dots\dots\dots (2.2)$$

atau dalam bentuk diferensial:

$$e = \frac{\partial N}{\partial W} \cdot \frac{W}{N} \dots\dots\dots (2.3)$$

Bila tingkat upah naik, jumlah orang yang dipekerjakan menurun, dan sebaliknya. Jadi $\frac{\Delta N}{\Delta W}$ dalam persamaan (2.2) dan $\frac{\partial N}{\partial W}$ dalam persamaan (2.3) adalah negatif. Oleh sebab itu elastisitas permintaan akan tenaga kerja juga negatif. Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung dari empat faktor, yaitu:

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal

2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan
3. Proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi
4. Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya.

2.1.2 Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

2.1.2.1 Pengertian Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia (RI) sendiri oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing ataupun yang berpatungan dengan investor dalam negeri. Modal asing dapat dimasukkan ke dalam bentuk modal swasta atau modal negara (Dewi dan Gunawan, 2018: 712).

Investasi yang masuk ke dalam suatu daerah dapat berupa investasi padat modal dan investasi padat karya, dimana investasi padat modal yakni investasi yang masuk kepada industri padat modal yang merupakan industri yang cenderung dalam proses produksinya tergantung pada mesin-mesin dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja manusia, sedangkan investasi padat karya yakni investasi yang masuk kepada industri padat karya yang merupakan industri yang cenderung dalam proses produksinya menggunakan tenaga kerja sumber daya manusia dibandingkan tenaga mesin (Dewi dan Sutrisna, 2015: 625).

2.1.2.2 Komponen-komponen Investasi

Silvia (Sukirno, 2000: 122) mengungkapkan investasi dalam praktiknya meliputi tiga komponen dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu, meliputi pengeluaran/perbelanjaan sebagai berikut:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan
2. Perbelanjaan untuk perumahan, bangunan kantor, pabrik, dan lainnya
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual.

Komponen-komponen yang ada di dalam investasi ternyata erat kaitannya dengan perbelanjaan, mulai dari berbagai jenis barang modal, kebutuhan tempat atau bangunan, hingga nilai stok barang-barang yang belum terjual.

2.1.2.3 Fungsi Penting Kegiatan Investasi

Silvia (Sukirno, 2000: 367) mengungkapkan kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting kegiatan investasi:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan

nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja

2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini memberi sumbangan penting ke atas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi merupakan instrumen yang penting di dalam perekonomian, pentingnya investasi ditunjang oleh fungsinya yang cukup krusial, seperti dapat meningkatkan pendapatan nasional, menstimulir pertumbuhan produksi nasional, dan penciptaan kesempatan kerja serta lapangan kerja baru.

2.1.2.4 Faktor Pendorong Mengalirnya Arus Penanaman Modal Asing

Afrizal (2015: 24-25) menyatakan tiga faktor yang menjadi pendorong mengalirnya arus penanaman modal asing dari suatu negara ke negara, diantaranya adalah:

1. Investor harus memiliki keuntungan kepemilikan atas saingan-saingannya di negara tuan rumah. Keuntungan kepemilikan tersebut bisa dalam bentuk hak monopoli atas suatu produk, teknologi yang unik dan canggih, pengetahuan pasar, atau teknik pemasaran yang baik

2. Negara tuan rumah harus memiliki keuntungan lokasi yang menarik bagi investor. Hal ini bisa dalam bentuk pasar domestik yang besar dan potensial pertumbuhannya, tenaga kerja yang murah dan melimpah, sumber daya alam yang melimpah, biaya transportasi yang rendah, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah
3. Harus ada keuntungan internalisasi yang akan mendorong investor untuk memilih menanamkan modalnya secara langsung daripada menanamkan modal dalam bentuk perjanjian-perjanjian lisensi lainnya. Ketertarikan seorang investor dalam memilih lokasi untuk menanamkan modalnya tergantung dari tipe perusahaan investasi tersebut. Sebagai contoh, untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam, maka lokasi yang akan dipilihnya adalah lokasi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam hal ini keuntungan kepemilikan dari perusahaan tersebut adalah produk padat modal dan teknologi yang cukup tinggi. Pada kasus ini keuntungan internalisasi mungkin tidak begitu kuat dan negara tuan rumah dapat melakukan negosiasi kepemilikan dengan investor perusahaan tersebut dalam hak kepemilikan, misalnya dengan bentuk kontrak kerja sama.

Keuntungan merupakan suatu hal yang menjadi faktor dalam lancar atau tidaknya arus penanaman modal asing. Keuntungan tersebut harus berada di dua sisi, yaitu sisi investor dan sisi negara penerima modal. Investor harus memiliki keuntungan kepemilikan sedangkan negara penerima modal harus memiliki keuntungan lokasi yang menarik.

2.1.2.5 Teori-teori tentang Penanaman Modal Asing

Firmansyah (Ardiansyah, 2014) mengemukakan teori-teori tentang penanaman modal asing yang diantaranya adalah:

1. Teori Ekonomi Neoklasik

Teori ini berpendapat bahwa penanaman modal asing memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Modal asing yang dibawa ke *host country* akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country*

2. Teori Ketergantungan

Teori ini secara diametral berlawanan dengan teori ekonomi neoklasik dengan berpendapat bahwa investasi asing tidak menimbulkan makna apapun bagi pembangunan ekonomi di *host country*. Mereka berpendapat bahwa investasi asing menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. Teori ini berpendapat bahwa investasi asing sebagai ancaman terhadap kedaulatan *host country* dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yurisdiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap *host country* sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap *host country* cukup besar

3. Teori Jalan Tengah

Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap *host country*, karena itu *host country* harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil

4. Teori Intervensi Pemerintah

Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap *infant industries* di negara-negara berkembang dan kompetisi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional. Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada *infant industries*, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik, dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing.

Berdasarkan teori-teori mengenai penanaman modal asing yang dikemukakan di atas, yang menyatakan penanaman modal asing baik adalah teori neoklasik yang mana penanaman modal asing dianggap mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sedangkan yang menyatakan penanaman modal asing kurang baik adalah teori ketergantungan yang mana pengaruh politik investasi asing cukup besar sehingga dapat memberikan ancaman terhadap

kedaulatan negara penerima modal. Sementara itu, teori jalan tengah adalah teori yang bersifat netral karena menganggap penanaman modal asing memiliki aspek positif dan negatif. Sedangkan teori intervensi pemerintah melihat pentingnya peran negara untuk mengarahkan kebijakan yang tepat terhadap penanaman modal asing.

2.1.3 Ekspor

2.1.3.1 Pengertian Ekspor

Kegiatan ekspor merupakan sebuah aktivitas perdagangan dimana terjadi penjualan barang dari dalam negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara lain. Termasuk diantaranya adalah barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu (Taufik, Rochaida, dan Fitriadi, 2014: 93).

Dewi dan Sutrisna (Yerimias, 2011) mengungkapkan bahwa kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan memindahkan barang dari dalam wilayah keluar wilayah tersebut dengan memenuhi persyaratan peraturan. Seiring dengan era globalisasi, dimana integrasi antar wilayah makin kuat, ekspor memegang peranan yang penting dalam menentukan laju perekonomian suatu daerah.

Dari pengertian di atas, jelas bahwasanya ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang memiliki peranan penting dalam menentukan laju perekonomian suatu daerah.

2.1.3.2 Teori-teori tentang Perdagangan Internasional

Yanuar (2016: 248-249) mengungkapkan beberapa teori mengenai perdagangan internasional, yaitu:

1. Teori Merkantilisme

Kaum merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkan akan disimpan dalam bentuk cadangan logam mulia (emas dan perak), semakin banyak cadangan logam mulia maka semakin kaya suatu negara. Semakin besar cadangan ini, semakin besar pula arus barang dan jasa untuk memenuhi keinginan manusia, dan dengan demikian akan semakin tinggi pula standar hidup masyarakat suatu negara

2. Model Ricardian

Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka anggap paling baik. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukkan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara

3. Model Heckscher-Ohlin

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model Heckscher-Ohlin dikenal sebagai Paradoks Leontief yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.

Dari beberapa teori perdagangan internasional di atas, menurut merkantilisme, satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkan akan disimpan dalam bentuk cadangan logam mulia (emas dan perak), semakin banyak cadangan logam mulia maka semakin kaya suatu negara. Kemudian menurut model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka anggap paling baik. Sedangkan menurut model Heckscher-Ohlin, pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam faktor pendukung.

2.1.3.3 Teori Keunggulan Absolut dan Keunggulan Komparatif

Yanuar (2016: 250) menjelaskan mengenai teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif seperti berikut ini:

1. Teori Keunggulan Absolut

Keunggulan absolut adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara atas negara lain dalam memproduksi suatu komoditi (spesialisasi) dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya (efisien) dibandingkan dengan memproduksi komoditi yang sama daripada yang dilakukan negara lain.

Menurut Adam Smith, perdagangan antar dua negara didasarkan atas keunggulan absolut terhadap negara lain dalam memproduksi suatu komoditi, tetapi kurang efisien (kerugian absolut) dibandingkan dengan memproduksi komoditi lainnya. Kedua negara akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan jika masing-masing negara melakukan spesialisasi produksi terhadap komoditi yang memiliki keuntungan absolut dan menukarkannya dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut. Melalui proses ini sumber daya di kedua negara dapat digunakan dengan cara yang paling efisien. *Output* kedua komoditi yang diproduksi juga akan meningkat. Peningkatan *output* ini akan menjadi indikator dari keuntungan spesialisasi produksi untuk kedua negara yang melakukan perdagangan (Salvatore, 1996)

2. Teori Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang diperoleh ketika salah satu negara lebih efisien dari negara lain dalam menghasilkan kedua jenis barang

yang diperdagangkan tersebut. Pada tahun 1817, David Richardo menerbitkan buku berjudul *Principles of Political Economy and Taxation* (Salvatore, 1996: 27) yang berisi penjelasan mengenai hukum keunggulan komparatif. Meskipun satu negara kurang efisien dibandingkan (atau memiliki kerugian absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil (ini merupakan komoditi dengan keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar (komoditi ini memiliki kerugian komparatif). Hukum ini merupakan salah satu hukum perdagangan internasional yang paling penting dan merupakan hukum ekonomi yang masih belum mendapat tantangan dari berbagai aplikasi dalam praktik.

Dari penjelasan mengenai teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif di atas, perbedaan kedua teori tersebut hanya terletak pada cara mengukur keunggulan suatu negara, yaitu teori keunggulan absolut yang menekankan biaya absolut dan teori keunggulan komparatif yang menekankan biaya relatif untuk memproduksi suatu barang.

2.1.3.4 Keuntungan Melakukan Ekspor

Farina dan Husaini (Sukirno, 2010: 205) mengungkapkan bahwa keuntungan melakukan ekspor adalah sebagai berikut:

1. Memperluas Pasar

Kegiatan ekspor merupakan cara untuk memasarkan produk-produk dalam negeri ke luar negeri. Adanya kegiatan ekspor membuat produk yang dihasilkan di dalam negeri tidak hanya dikonsumsi oleh penduduk dalam negeri

2. Menambah Devisa Negara

Kegiatan ekspor memungkinkan eksportir dalam negeri memasarkan produknya ke luar negeri. Transaksi ekspor ini dapat menambah devisa negara yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara

3. Memperluas Lapangan Kerja

Kegiatan ekspor akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan semakin banyaknya ekspor, maka produksi yang dihasilkan akan semakin banyak. Peningkatan jumlah produksi ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Sebagai salah satu komponen di dalam perekonomian, tentu saja ekspor memiliki berbagai keuntungan seperti memperluas pasar dan menambah devisa negara. Lalu yang tak kalah penting adalah dapat memperluas lapangan kerja, hal ini dikarenakan ketika jumlah produksi untuk ekspor meningkat atau banyak, maka tenaga kerja yang dibutuhkannya pun akan banyak, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat meningkat.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Andi Wijaya, Toti Indrawati, dan Eka Armas Pailis/2014/Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau	PMA dan penyerapan tenaga kerja	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan	<p>Hubungan dan pengaruh PMA terhadap penyerapan tenaga kerja adalah negatif tidak signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif tidak signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif signifikan</p>	Jom FEKON Vol. 1 No. 2 Hal. 1-15 ISSN 2355-6854

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
2	Ardi Adji, Waris Marsisno, dan Ulin Nafngiyana/2012/Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Makanan Minuman di Indonesia	Ekspor, PMA, dan penyerapan tenaga kerja	Penetrasi impor, upah, bahan baku impor, dan <i>output</i>	<p>Hubungan intensitas ekspor, bahan baku impor, dan <i>output</i> terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif</p> <p>Hubungan penetrasi impor dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah negatif</p> <p>Hubungan dan pengaruh PMA terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif tidak signifikan</p>	Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol. 6 No. 2 Hal. 253-266 ISSN 1979-9187

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
3	Emilia, Rahma Nurjanah, dan Siti Aminah/2015/Analisis Pengaruh Ekspor ke China terhadap Pendapatan Perkapita dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia	Ekspor dan penyerapan tenaga kerja	Pendapatan perkapita	Hubungan dan pengaruh ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja dan ekspor terhadap pendapatan per kapita adalah positif signifikan	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 10 No. 2 Hal. 326-337 p-ISSN 2085-1960 e-ISSN 2684-7868
4	Emilia, Rahma Nurjanah, dan Siti Aminah/2018/Dampak Ekspor ke Tiga Negara di Kawasan Selat Malaka terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Pertanian	Ekspor dan penyerapan tenaga kerja	-	Hubungan dan pengaruh ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif tidak signifikan	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 13 No. 1 Hal. 29-36 ISSN 2085-1960

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
5	Junaidi E. Momongan/2013/Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya terhadap Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara	PMA, PMDN, dan penyerapan tenaga kerja	PDRB dan kemiskinan	<p>Hubungan dan pengaruh PMA dan PMDN terhadap PDRB adalah positif signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh PMA, PMDN, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh PMA dan PMDN terhadap kemiskinan adalah positif signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh PDRB terhadap kemiskinan adalah negatif signifikan</p>	Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Hal. 530-539 ISSN 2303-1174

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
6	Khairil Akbar dan Gunadi/2018/Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Samarinda	PMA, PMDN, dan penyerapan tenaga kerja	-	Hubungan dan pengaruh PMA dan PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif signifikan	JURNAL EKSIS Vol. 14 No. 2 Hal. 3463-3530 ISSN 0216-6437
7	Linda Kurnia Dewi dan Kunto Inggit Gunawan/2018/Analisis Pengaruh Investasi PMA, PMDN, Nilai Produksi, dan Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Timur	PMA, PMDN, dan penyerapan tenaga kerja	Nilai produksi, dan unit usaha	Hubungan dan pengaruh PMA terhadap penyerapan tenaga kerja adalah negatif tidak signifikan sedangkan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah negatif signifikan	Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 3 No. 2 Hal. 711-724 ISSN 2503-4634
				Hubungan dan pengaruh PMDN dan unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif signifikan	

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
8	Muhammad Taufik, Eny Rochaida, dan Fitriadi/2014/Pengaruh Investasi dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur	Ekspor dan penyerapan tenaga kerja	Investasi dan pertumbuhan ekonomi	<p>Hubungan dan pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif tidak signifikan</p>	Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 7 No. 2 Hal. 90-101 ISSN 2301-8968

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
9	Ni Made Sintya Dewi dan I Ketut Sutrisna/2015/Pengaruh Investasi dan Ekspor terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi	Ekspor dan penyerapan tenaga kerja	Investasi dan pertumbuhan ekonomi	<p>Hubungan dan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif tidak signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif tidak signifikan</p>	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4 No. 6 Hal. 621-636 ISSN 2303-0178

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
10	Rizki Kenraraswati, M. Surya Hidayat, dan Yohanes Vyn Amzar/2019/Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri, Upah Minimum, dan Belanja Modal terhadap Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jambi	PMDN dan penyerapan tenaga kerja	Upah minimum dan belanja modal	<p>Hubungan dan pengaruh PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja adalah negatif signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif signifikan</p> <p>Hubungan dan pengaruh belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja adalah negatif tidak signifikan</p>	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 14 No. 1 Hal. 37-44 ISSN 2085-1960 (<i>print</i>)

2.2 Kerangka Pemikiran

Penyerapan tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi penyerapan tenaga kerja, maka kesejahteraan masyarakat pun semakin meningkat. Penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan ekspor merupakan beberapa faktor yang turut berkontribusi dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut.

2.2.1 Hubungan Penanaman Modal dalam Negeri dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Jumlah penanaman modal dalam negeri di suatu daerah akan memengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Semakin banyak penanaman modal dalam negeri, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat terserap. Hal ini dapat didasari oleh dampak dari penanaman modal dalam negeri yang bentuknya dapat berupa perluasan usaha atau pembukaan lapangan kerja baru sebagai akibat dari munculnya perusahaan-perusahaan baru. Sehingga hubungan penanaman modal dalam negeri dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Kurnia Dewi dan Kunto Inggit Gunawan (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Investasi PMA, PMDN, Nilai Produksi, dan Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa hubungan penanaman modal dalam negeri dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif. Sehingga

ketika penanaman modal dalam negeri meningkat, maka penyerapan tenaga kerja pun meningkat.

2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Jumlah penanaman modal asing di suatu daerah akan memengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Semakin banyak penanaman modal asing, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat terserap. Hal ini didasari oleh kelebihan yang dimiliki penanaman modal asing seperti sifatnya yang jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru (Pasaribu, Tanpa Tahun: 239). Sehingga hubungan penanaman modal asing dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Adji, Waris Marsisno, dan Ulin Nafngiyana (2012) dengan judul Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Makanan Minuman di Indonesia menyatakan bahwa hubungan penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif. Sehingga ketika penanaman modal asing meningkat, maka penyerapan tenaga kerja pun meningkat.

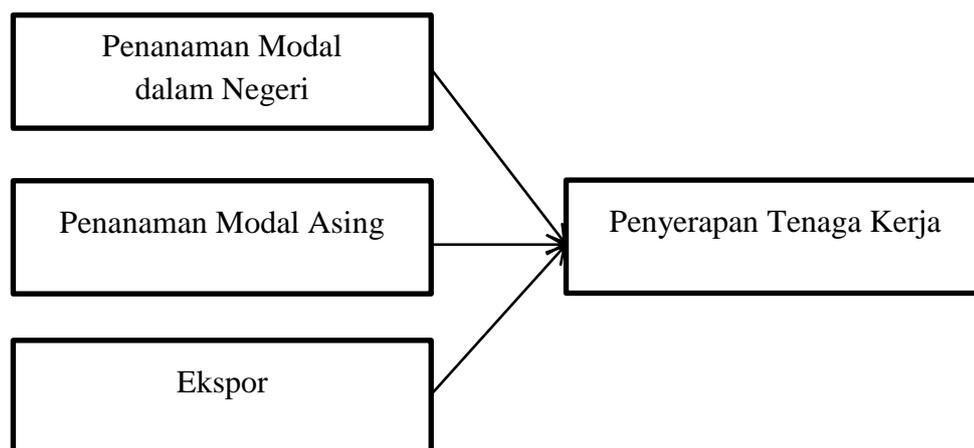
2.2.3 Hubungan Ekspor dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Jumlah ekspor di suatu daerah akan memengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Semakin banyak ekspor, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat terserap. Hal ini didasari karena ketika jumlah ekspor banyak otomatis jumlah produksinya pun banyak. Dalam melakukan proses produksi

tentunya tidak terlepas dari faktor produksi yang salah satunya adalah tenaga kerja. Semakin tinggi jumlah produksi, artinya semakin tinggi tenaga kerja yang diperlukan. Sehingga hubungan ekspor dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Emilia, Rahma Nurjanah, dan Siti Aminah (2015) dengan judul Analisis Pengaruh Ekspor ke China terhadap Pendapatan Perkapita dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia menyatakan bahwa hubungan ekspor dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif. Sehingga ketika ekspor meningkat, maka penyerapan tenaga kerja pun meningkat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian tentang “Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019” apabila digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang sebelumnya telah dipaparkan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial, diduga penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan ekspor berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019
2. Secara bersama-sama, diduga penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan ekspor berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.